



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA, DAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASIA REPUBLIK INDOENSIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 12 September 2023
Waktu Rapat : Pukul 16.57 s.d. 18.52 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-P.GOLKAR)
- Acara Rapat : Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024.
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 26 dari 47 orang Anggota dengan rincian
A. ANGGOTA DPR RI:
PIMPINAN:
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-P.GOLKAR)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

ANGGOTA:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDOENSIA PERJUANGAN:
6 orang Anggota dari 12 Anggota:
 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
 2. Riyanta
 3. Drs. Cornelis, M.H.
 4. Paryono
 5. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:
5 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
 2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
 3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
 4. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:
1 orang Anggota dari 6 Anggota:
 1. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM:
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
 2. H. Haruna, M.A., M.B.A

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. H. Mohammad Muraz, M.M.
 2. Rezka Oktoberia
 3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
 2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
 3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

B. ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:

1. H. Heru Sudjatmoko (Izin)
2. Ir. Hugua (Izin)
3. Drs. Difriadi (Izin)
4. Khairul Muhtar, S.E., M.M. (Izin)

C. UNDANGAN:

1. Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Sekretaris Kabinet RI;
3. Kepala Staf Kepresidenan RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Selamat sore,

Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Sekretaris Negara beserta seluruh jajaran,

Yang terhormat Saudara Sekretaris Kabinet atau yang mewakili serta seluruh jajaran,

Yang terhormat Saudara Kepala Kantor Presiden yang mewakili,

Kemudian yang terhormat Saudara Kepala DPIP serta yang mewakili beserta seluruh jajaran, dan

Yang terhormat seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama tugas dan tanggung jawab konstitusional dibidang anggaran dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Rapat sore ini rapat maraton dari pagi, jadi absennya juga sudah dari pagi jadi saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini sudah korum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu

perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.57 WIB)

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Kantor Kepresidenan, dan Kepala BP atau yang mewakili, atas kesediaannya untuk menghadiri undangan rapat pada hari ini.

Bapak/ibu sekalian,

Rapat ini adalah rapat lanjutan pembahasan tentang RKA/KL tahun 2024. Sebelumnya kita sudah 2 kali melaksanakan rapat. Pertama rapat kerja seperti yang kita laksanakan sekarang ini dan kemudian yang dilanjutkan dengan rapat konsinyering pendalaman tentang anggaran. Oleh karena itu hari ini sebenarnya tidak terlalu perlu lama-lama, nanti kita dengarkan lagi penjelasan apalagi sudah ada keputusan dari Badan Anggaran.

Sebelumnya saya ingin memberikan informasi kepada kita semua, Pimpinan, Anggota Komisi II. Bahwa kita mendapatkan 2 surat. Satu, dari Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung yang minta izin tidak bisa hadir. Kemudian juga dari Kepala Staf Kepresidenan Pak Jendral Moeldoko juga menyampaikan surat izin dan diwakilkan oleh Wakil Sekretaris Kabinet. Pak Moeldoko diwakilkan oleh Deputi II ya Deputi II KSP. Oh, BPIP juga ada suratnya ya, Pak Kepala BPIP juga minta izin tidak bisa hadir diwakilkan oleh Wakil Kepala BPIP.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan langsung kepada Saudara Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan penjelasannya, silakan Pak.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (Prof. Dr. PRATIKNO, M.Soc.Sc.):

Terima kasih.

**Bapak Ketua Komisi II dan Bapak Wakil Ketua, dan
Bapak/Ibu Anggota Komisi II yang saya hormati,**

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Omswastiastu,

Nama Budaya,

Salam kebajikan,

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan
Bapak/Ibu Anggota Komisi II yang kami hormati, dan**

Hadirin semuanya,

Kami akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran dalam rangka penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2024. Kami mulai dengan menjelaskan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 beserta penyesuaiannya ya.

Jadi target PNBPN Kemensesneg tahun 2023 sebesar Rp436.999.024.000,00 itu terdiri dari PNBPN dari BLU PPK Gelora Bung Karno sebesar 217 miliar 755 juta lebih. Kemudian PNBPN BLU Kemayoran sebesar Rp216.182.661.000,00 lebih. Kemudian PNBPN dari unit lain di Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.061.315.000,00.

Hingga tanggal 6 September yang lalu, telah dicapai 86,67%, jadi itu nilainya Rp378.741.335.000,00 lebih. Jadi 86,67% ini kami yakin akan bisa tercapai 100% atau bahkan mungkin bisa lebih dalam sisa waktu 3 bulan kedepan ini.

**Bapak/Ibu Pimpinan, dan
Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 4 Oktober 2022, pagu alokasi anggaran Kemensesneg 2023 adalah sebesar Rp2.609.749.000.000,00 lebih. Terhadap pagu tersebut sudah dilakukan pencadangan ini sesuai dengan Surat Menkeu atau *automatic adjustment* melalui pemblokiran DIPA tahun 2023 sebesar 154 miliar 21 juta lebih.

Jadi, pertama pemblokiran itu adalah pemotongan untuk anggaran pegawai diblokir Rp44.660.681.000,00 dan pembukaan dan kemudian dilakukan pembukaan pemblokiran sebesar 109 miliar 361 juta lebih. Sehingga dengan demikian saat ini tidak ada lagi pencadangan anggaran blokir pada DIPA Kementerian Sekretaris Negara Tahun 2023.

Selain itu kemudian terdapat penambahan alokasi anggaran belanja Kementerian Sekretariat Negara, yaitu:

1. Penambahan alokasi anggaran sebesar 104 miliar 951 juta lebih yang bersumber dari penggunaan saldo awal kas BLU. Yaitu dari BLU PPK GBK sebesar 64 miliar 138 juta lebih dan kemudian itu dialokasikan untuk pengadaan sarana prasarana pendukung dan pemeliharaan *venue* di GBK. Kemudian dari BLU PPK Kemayoran sebesar Rp40.813.000.060.000,00;
2. Penambahan yang ke-2 adalah penambahan anggaran dari Bendahara Umum Negara dari (BUN) sebesar Rp980.820.263.000,00 yang dialokasikan untuk persiapan penyelenggaraan dan pengamanan penerimaan tamu negara IKTT ASEAN TAHUN 2023;

3. Penambahan yang ke-3 adalah penambahan anggaran hibah luar negeri sebesar Rp11.624.780.000,00 untuk kegiatan percepatan pencegahan stunting tahun 2023, ini seperti tahun sebelumnya juga.

Dengan penyesuaian tersebut, maka anggaran Kemensesneg 2023 menjadi Rp3.662.485.566.000.00 yang kami alokasikan untuk:

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.386.583.000.000,00 lebih, termasuk di dalamnya itu alokasi untuk Satker BLU yang bersumber dari PNBP BLU sebesar Rp471.126.000.000,00 lebih rupiah;
2. Anggaran 2023 tersebut untuk program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 2 triliun 275 juta 902, maaf, Rp2.275.902.000.000,00 lebih.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Terkait realisasinya, realisasi anggaran sampai dengan 6 September 2023 pagu anggaran belanja sudah teralokasikan sebesar Rp2.195.253.000.000,00 lebih, atau sebesar 59,94% dari total alokasi anggaran penyesuaian yang sebesar Rp3.662.485.000.000,00 lebih tersebut.

Realisasi tersebut sudah termasuk realisasi belanja 2 BLU yang merupakan pagu penggunaan dari capaian target PNBP. Namun, jika realisasi belanja BLU PPK GBK dan Kemayoran tidak turut diperhitungkan, realisasinya sebesar 62,24%.

Jadi kami optimis *insya Allah* realisasi penerimaan PNBP dan tingkat penyerapan anggaran tahun 2023 ini dapat kami terus tingkatkan, sehingga bisa semoga bisa lebih baik dari 2022 yang lalu.

Rincian target PNBP dan pagu anggaran detailnya dan juga realisasinya kami jabarkan di lampiran 1. Sebagai catatan tambahan saja, kami juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk pelaksanaan tahun anggaran 2022 yang lalu.

**Bapak-Bapak Pimpinan, dan
Bapak/Ibu Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Terkait dengan RKA Kemensesneg berdasarkan pagu anggaran tahun 2024, kami target PNBP-nya sebesar Rp470.422.804.000,00 jadi naik 7,65% dibanding tahun lalu, terus tahun lalu maksudnya tahun sekarang 2023.

Sedangkan target PNBP tahun 2024 penjabarannya itu:

- PNBP dari GBK Kemayoran itu Rp239.530.551.000,00;
- Sedangkan dari PNBP PLU PPK Kemayoran sebesar Rp227.406.340.000,00; dan
- Yang ketiga PNBP dan lainnya dari unit kementerian lainnya sebesar Rp3.490.913.000,00.

Terkait dengan pagu anggaran tahun 2024, Kemensesneg memperoleh pagu anggaran sebesar Rp2.650.000.162.000,00 lebih. Yang ini artinya mengalami penurunan sedikit sebesar Rp1.000,00 dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2024. Namun, jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2023 setelah penyesuaian, pagu anggaran tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 27,64%.

Pagu anggaran 2024 dialokasikan untuk 2 program yaitu:

- Program dukungan manajemen sebesar Rp1.391.437.000.000,00 lebih; Yang didalamnya termasuk alokasi 2 BLU yang bersumber dari PNPB yaitu sebesar Rp393.000.662.000,00 lebih.
- Kedua, alokasi kedua, untuk pagu anggaran 2024 adalah untuk program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, sebesar Rp1.258.725.000.000,00 lebih.
Rinciannya Bapak/Ibu sekalian itu bisa, kami sajikan di dalam lampiran 2.

**Bapak/Ibu Pimpinan, dan
Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Demikian butir-butir pengantar yang kami bisa sampaikan. Tentu saja kami akan siap untuk memberikan penjelasan jika demikian, jika diperlukan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera,

Om swastiata,

Nama budaya,

Saya kembalikan kepada Bapak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Saudara Menteri Sekretaris Negara.

Selanjutnya kami persilakan Wakil Sekretaris Kabinet.

WAKIL SEKRETARIS KABINET RI (Dr. FADLANSYAH LUBIS, S.H., LL.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, para
Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali hal-hal yang ingin kami sampaikan, sebagaimana surat yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Mohon izin Bapak Sekretaris Kabinet masih ada acara dengan Bapak Presiden.

Pimpinan dan Anggota Dewan,

Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan agenda sesuai undangan DPR yaitu penyesuaian RKA/KL Tahun Anggaran 2024. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2024.

Perkenankan kami mengawali dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, atas undangannya pada rapat kali ini dan kami berharap kerjasama dan dukungan yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus kita lanjutkan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2023, terlebih dahulu perkenankan kami menjelaskan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022.

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2022 yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dimana pemeriksaan dimaksud bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Sekretariat Kabinet dengan memperhatikan kesesuaian laporan efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dan pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa Sekretariat Kabinet mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 11 kali secara berturut-turut, dari tahun 2012 sampai dengan 2022.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya perkenankan kami menjelaskan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.

Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun anggaran 2023, Sekretariat Kabinet memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp352.292.228.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 9 Desember 2022, hal *automatic adjustment* belanja Kementerian dan Lembaga tahun anggaran 2023. Sekretariat Kabinet diminta untuk melakukan *automatic adjustment* atau pencadangan anggaran sebesar Rp28.183.378.000,00.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp10.583.514.000,00. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S52/MK: /2023. Perihal penetapan satuan anggaran bagian anggaran 999.08 dari BABUN pengelolaan belanja lainnya ke BA Sekretariat Kabinet, untuk kegiatan dan kebutuhan operasional utusan khusus Presiden bidang kerjasama penuntasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S.557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023. Hal penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari blokir *automatic adjustment* tahun anggaran 2023. Sekretariat Kabinet telah melakukan realokasi *automatic adjustment* yang berasal dari belanja pegawai ke bagian anggaran bendahara umum negara sebesar Rp21.739.582.000,00.

Setelah dikurangi sisa *automatic adjustment* sebesar Rp6.443.796.000,00 maka pagu Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2023 menjadi sebesar 334 juta maaf, Rp334.692.364.000,00. Adapun ringkasan perubahan pagu Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Dari pagu Setkab tersebut sampai dengan tanggal 6 September 2023, telah teralisasi sebesar Rp238.873.478.000,00 atau sebesar 71,37%. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2023 menurut program setelah adanya penyesuaian kami sajikan pada tabel 2.

Adapun realisasi pagu Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2023. Jenis belanja, kami akan sajikan pada tabel 3 sebagaimana dalam laporan yang telah kami sampaikan.

Realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2023, menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran pertama dengan sisa waktu tahun anggaran 2023 yang kurang lebih 3 bulan. Target *output* yang belum tercapai termasuk merealisasikan *output* belanja modal akan kami upayakan untuk penyerapan anggaran hingga tahun 2023 dapat lebih maksimal.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terkait RAPBN Setkab tahun 2024.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP0402/04 2023, tanggal 10 April 2023. Hal, pagu indikatif belanja Kementerian dan Lembaga dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2024, Sekretariat Kabinet mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp348.769.306.000,00.

Dari pagu anggaran yang diperoleh Sekretariat Kabinet, pada tahun anggaran 2024 bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Setkab tahun 2023 yang sebesar Rp352.292.228.000,00 maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp3.522.922.000,00 atau sebesar 1%.

Pagu anggaran Setkab tahun 2024 tersebut akan dialokasikan pada 2 program dengan 21 kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Adapun perbandingan alokasi anggaran tahun 2023 dengan pagu anggaran Setkab tahun anggaran 2024 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel 4 sebagaimana dimaksud.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terkait usulan tambahan anggaran Setkab tahun anggaran 2024.

Dapat kami sampaikan bahwa Sekretariat Kabinet melalui Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan tanggal 30 Mei 2023. Hal, menyampaikan usulan tambahan anggaran Setkab tahun 2024 telah menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk kebutuhan kegiatan dan oprasional utusan khusus Presiden, bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan serta kebutuhan untuk kegiatan inisiatif baru Sekretariat Kabinet.

Usulan tambahan anggaran tersebut telah disetujui melalui kesimpulan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada tanggal 8 Juni 2023, dan usulan tambahan tersebut sebesar Rp16.785.887.000,00.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 31 Juli 2023. Hal, pagu anggaran belanja kementerian lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024, dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2024. Besaran pagu anggaran yang diperoleh Setkab masih sama dengan pagu indikatif Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut melalui Surat Setkab tanggal 7 Agustus 2023. Hal, penyampaian usulan anggaran belanja tambahan Setkab tahun 2024, Sekretariat Kabinet mengajukan kembali usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp16.785.887.000,00. Adapun rincian lebih detail mengenai usulan tambahan anggaran Setkab tahun anggaran 2024, kami sampaikan dalam lampiran 3.

Selanjutnya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut kami mohon agar dapat disetujui dan dialokasikan dalam pagu alokasi anggaran Setkab tahun anggaran 2024.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kami mengharapkan kiranya penjelasan kami ini dapat memenuhi harapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati.

Kami berharap kiranya kita dapat bersama-sama membangun hubungan kerjasama yang erat dalam menjalankan tugas yang mulia ini, semoga kerjasama tersebut akan tetap berlanjut dan terpelihara dengan baik.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Kepala Staf Kepresidenan.

DEPUTI II KSP BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, beserta seluruh Anggota Komisi II DPR RI, Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Om swastiatu,

Nama budaya,

Salam kebajikan,

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kami menyampaikan permohonan maaf, Bapak Kepala Staf Kepresidenan tidak bisa hadir sehingga diwakilkan oleh kami pada saat ini.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI atas undangan kepada kami untuk mengikuti rapat kerja pada hari ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati, serta Hadirin yang berbahagia,

Sesuai dengan agenda rapat kerja hari ini, kami diminta untuk menyampaikan penjelasan terkait RKA/KL Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah kami sampaikan pada rapat dengar pendapat sebelumnya. Berikut beberapa penjelasan yang perlu kami sampaikan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara tanggal 7 Agustus 2023. Hal, penyampaian pagu anggaran tahun anggaran 2024, dan penyusunan RKA/KL berdasarkan pagu anggaran tahun anggaran 2024, Satker Kantor Staf Presiden mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp122.033.004.000,00. Pagu anggaran 2024 tersebut dialokasikan untuk 2 program.

Yaitu pertama, program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp14.284.995.000,00 dengan kegiatan pengendalian program-program prioritas nasional dan pengelolaan isu-isu strategis dan komunikasi politik.

Kedua, program dukungan manajemen sebesar Rp107.748.009.000,00 dengan kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen Kantor Staf Presiden.

Pagu anggaran tahun 2024 tersebut adalah sama dan tidak mengalami kenaikan anggaran bila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2024. Rincian pagu anggaran Kantor Staf Presiden tahun 2024 tersebut kami sajikan dalam tabel pada lampiran 1 bahan pengantar ini.

Rencana Kantor Staf Presiden tahun anggaran 2024, akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:

- Pengendalian 39 program prioritas nasional dalam bentuk monitoring, *the bottle making*, akselerasi berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- Kemudian yang kedua, komunikasi politik dan diseminasi informasi, untuk mendukung pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis yang terdiri dari 8 strategi komunikasi politik, dan 20 bidang diseminasi informasi;
- Ketiga, pengelolaan isu strategis yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan target 240 isu strategis.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Selanjutnya kami sampaikan penjelasan terkait pelaksanaan anggaran tahun 2023, berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara tanggal 10 oktober tahun 2023. Hal, pagu alokasi anggaran pada bagian anggaran 007, Kementerian Sekretariat Negara tahun anggaran 2023. Kantor Staf Presiden mendapat pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp121.778.584.000,00.

Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara tanggal 14 Desember tahun 2022. Hal, *automatic adjustment* belanja pada bagian anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023. Pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2023, Kantor Staf Presiden mendapatkan blokir anggaran *automatic adjustment* sebesar Rp6.185.477.000,00.

Alokasi anggaran tahun 2023 setelah pemotongan blokir *automatic adjustment* adalah sebesar Rp115.593.107.000,00. Adapun capaian realisasi anggaran sampai dengan 6 september 2023 adalah sebesar Rp67.528.660.796,00 atau 58,42% dari alokasi anggaran tahun 2023 setelah pemotongan blokir. Rincian realisasi anggaran kami sajikan dalam tabel pada lampiran 2 bahan pengantar ini.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja hari ini. Dan kembali kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota

Komisi II DPR RI yang telah bekerjasama dengan baik serta memberikan dukungan kepada Kantor Staf Presiden.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Deputi II KSP.

Selanjutnya kami persilakan Wakil Kepala BPIP.

WAKIL KEPALA BPIP (Dr. Drs. KARJONO ATMOHARSONO, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi II, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang kami hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kabinet Republik Indonesia atau yang mewakili, dan Yang kami hormati Bapak Kepala Staf Presiden Republik Indonesia atau yang mewakili, Bapak/Ibu para Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Shalom,

Nama budaya,

Salam kebajikan,

Rahayu-rahayu,

Salam Pancasila.

Terima kasih.

Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini *alhamdulillah* kita semua dapat diberikan nikmat sehat.

**Bapak/Ibu yang kami hormati,
Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II,**

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, dan juga mohon maaf Bapak Kepala tidak bisa menghadiri dan mewakilkan Wakil Kepala BPIP.

Selanjutnya mohon dengan hormat, kami menghaturkan beberapa hal terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran RKA/KL Tahun 2024, namun demikian izinkan kami menyampaikan anggaran tahun 2023 BPIP.

Anggaran BPIP tahun 2023 itu sebesar Rp357.496.465.000,00 adapun alokasi blokir itu terdiri atas:

- Yang pertama, sebesar Rp1.500.000.000,00; dan
- Yang kedua, sebesar Rp8.150.450.000,00.

Ini dalam rangka pengembalian blokir belanja pegawai kepada bagian anggaran bendahara umum atau BA BUN.

Alokasi anggaran BPIP tahun 2023 sehingga menjadi Rp347.841.500.000,00.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Bahwa realisasi anggaran per-8 September 2023 itu sebesar Rp233.227.400.558,00 atau sebesar 67,05%. Hal ini terbagi atas:

- Yang pertama, Program Dukungan Manajemen realisasinya Rp141.973.384.790,00 atau sebesar 75,41%; selanjutnya
- Program Pembinaan ideologi Pancasila itu realisasi sebesar Rp91.254.015.768,00 atau sebesar 57,19%.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan besaran realisasi pada unit Eselon I.

- Dari Sekretaris Utama itu sebesar Rp141.973.384.790,00 atau sebesar 75,41%; selanjutnya
- Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan itu sebesar Rp38.750.568.102,00 atau sebesar 50,76%;
- Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengemasan Regulasi sebesar Rp8.729.447.668,00 atau sebesar 63,21%;
- Deputi Bidang Pengkajian Materi sebesar Rp8.923.947.590,00 atau sebesar 61,95%; selanjutnya
- Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp9.483.468.320,00 atau sebesar 40,57%; dan yang terakhir
- Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebesar Rp25.359.584.088,00 atau sebesar 80,19%.

Bapak/Ibu Pimpinan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Terkait dengan capaian strategis yang dilaksanakan oleh BPIP periode Januari sampai dengan September meliputi:

- Pertama, pelaksanaan hari lahir Pancasila Tahun 2023, yang dihadiri oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden;
- Kemudian juga BPIP mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pada tahun 2022;
Dan *alhamdulillah* sampai saat ini BPIP mendapatkan 4 kali WTP, yaitu pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Artinya sejak BPIP berdiri sampai sekarang WTP.
- Selanjutnya juga BPIP melaksanakan program penurunan stunting;
- Kemudian juga terkait dengan hari ini kebetulan melaksanakan program eksekutif nasional atau Program Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Program Eksekutif Nasional (PIP PEN);
Ini bekerjasama dengan LAN dan juga bekerjasama dengan ANRI.
- Selanjutnya penyusunan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
Dan *alhamdulillah* sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa mata ajar Pancasila mulai dari paud sampai perguruan tinggi utamanya yang sudah siap betul adalah kelas 1 sampai dengan kelas 12 SMA.
- Kemudian penganugerahan *icon* prestasi Pancasila tahun 2023, dan juga sosialisasi Pancasila kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Ada 50 lokus atau titik pada bulan September sampai dengan November.

Mohon dengan hormat Bapak Pimpinan, dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

BPIP mendapat alokasi pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp341.127.197.000,00. Dan BPIP memiliki 2 program yakni:

- Program dukungan manajemen; dan
- Pembinaan ideologi Pancasila.
- Program dukungan manajemen alokasi anggaran sebesar Rp181.477.483.000,00; dan juga
- Program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp159.649.714.000,00.

Adapun rincian pagu anggaran pada surat bersama di tahun 2024 ini terdiri dari 2 yakni:

- Belanja oprasional; dan

- Belanja non-operasional.
 - Belanja operasional dibagi menjadi:
 - Belanja operasional pegawai; dan
 - Belanja operasional perkantoran. Yang besarnya untuk:
 - Belanja operasional pegawai sebesar Rp74.001.412.000,00; dan juga
 - Belanja operasional sebesar Rp 29.250.000.000,00.
- Dan total untuk belanja operasional sebesar Rp103.251.412.000,00.
- Kemudian yang untuk belanja *non-operasional* sebesar Rp 231.875.785.000,00.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Pada tahun 2024, kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh BPIP yakni:

- Pertama sosialisasi nilai Pancasila yang melibatkan kementerian/lembaga, unsur legislatif, dan perangkat daerah.
- Kemudian juga penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan juga sertifikasi kepada pendidik dan pelatih diklat pembinaan ideologi Pancasila,
- Penyempurnaan arah kebijakan peta jalan, dan juga terkait dengan GBHIP (Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila); dan
- Penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila;
- Kemudian juga akreditasi pendidikan dan pelatihan;
- Kemudian pelaksanaan pelatihan *training of trainer* dan juga penyusunan standar jalan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- Kemudian kajian pembangunan semesta berencana dan juga terkait dengan kajian ekonomi Pancasila dan juga peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2024;
- Begitu juga rekrutmen seleksi dan pelatihan Paskibraka, serta penetapan purna Paskibraka Duta Pancasila; dan
- Yang terakhir melakukan monitoring evaluasi dan sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

BPIP mengusulkan anggaran pada tahun 2024, ini maksud kami adalah tambahan anggaran sebesar Rp149.181.317.000,00. Adapun penggunaannya:

- Yang pertama, untuk peningkatan pemahaman nilai Pancasila melalui sosialisasi, itu sebesar 40 miliar; kemudian
- Penguatan *branding* BPIP sebesar 15 miliar; dan
- Fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka sebesar Rp28.754.092.000,00;
- Kemudian juga penguatan rekomendasi bidang hukum advokasi pengawasan regulasi sebesar Rp 5.116.779.000,00; dan juga
- Penguatan rekomendasi hasil kajian implementasi BPIP itu sebesar Rp 6.500.000.000,00;

- Kemudian penguatan rekomendasi arah kebijakan itu sebesar Rp 1.500.000.000,00; dan juga
- Penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda dan komponen masyarakat lainnya sebesar 25 miliar; dan yang terakhir
- Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar 27 miliar 394 juta. Mohon maaf, Rp10.446.000,00.

Usulan penambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Menteri Nasional dan Menteri Keuangan, dan juga tentang permohonan usulan tambahan anggaran BPIP pada tahun 2024.

**Bapak/Ibu Pimpinan, dan
Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja pada hari ini, besar harapan kami kiranya apa yang telah kami sampaikan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Atas perhatian dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, kami *haturkan* terima kasih.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Shanti-Shanti Om,

Nama budaya,

Rahayu-rahayu,

Salam Pancasila.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Salam Pancasila,

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Wakil Kepala BPIP.

**Bapak/Ibu Pimpinan, dan seluruh
Anggota Komisi II yang saya hormati,**

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari masing-masing Kementerian dan Lembaga, terkait dengan soal RKA/KL RAPBN Tahun 2024.

Seperti biasanya setelah dijelaskan saya buka sesi untuk pendalaman, walaupun sekali lagi saya katakan ini pertemuan kita yang ke-3.

Kami persilakan.

Karena dari awal periode sampai sekarang yang selalu nomor satu, Pak Gaus. Kita pindah sekarang ini, Pak Ongku kemudian Pak Mardani, baru Pak Gaus.

Oke, silakan Pak Ongku.

F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Wakil Menteri Setkab,
Kementerian Sekretaris Negara,
Pimpinan BPIP dan juga KSP, serta
Kawan-kawan Komisi II yang saya hormati,**

Saya langsung saja ke Setneg terlebih dahulu, itu adalah terkait dengan pertama terkait dengan PNBPN Pak.

Saya melihat di dalam presentasi ini bahwa PNBPN dari Gelora Bung Karno serta PNBPN dari Satker Kemayoran ya, masing-masing sekitar 218 miliar dan juga 216 miliar ya. Sementara biaya untuk satker-satker tersebut yang Satker untuk GBK itu sebesar 204 miliar dan Sakter Kemayoran 190 miliar. Artinya ini kurang lebih mendatangkan surplus 14 miliar untuk GBK Kemayoran dan 26 miliar untuk Satker, mohon maaf 14 miliar untuk GBK Bung Karno, dan 26 miliar untuk Satker Kemayoran.

Ada beberapa pertanyaan saya, yang pertama adalah saya ingin tahu apakah pengelolaan dari pada GBK ini dan Kemayoran itu memang dikelola sendiri oleh Setneg atau ada Satkernya khusus? Atau sekedar disewakan saja kepada pemakai? Iya itu pertama.

Kalau seandainya disewakan saja untuk kebutuhan Satker tersebut sebesar 204 miliar, saya kira ini terlalu banyak ya kalau dilihat dari pendapatan yang 218 miliar, demikian juga Kemayoran.

Pertanyaan yang kedua adalah saya ingin tahu, apa saja yang masuk di dalam Satker GBK dan apa saja yang masuk di dalam Satker Kemayoran? Karena waktu saya masih kuliah dulu rasanya, kuliahnya di Bandung Pak. Rasanya itu kompleks GBK itu mencakup juga yang sekarang menjadi Plaza Senayan, yang sekarang menjadi Hotel Mulia, dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Apakah itu memang sudah di *handover* kepada

swasta dengan cara apakah *ruislag* atau itu masih masuk dalam yang dimaksud dengan GBK Bung Karno tersebut.

Demikian juga di Kemayoran, seluruh bekas Airport Kemayoran tersebut sekarang banyak berdiri apartemen, sekolah, perumahan, dan sebagainya. Apakah hanya tersisa tempat Jakarta Fair itu saja yang masuk dalam Satker Kemayoran yang mendatangkan PNPB sebesar 216 miliar tersebut?

Yang ini hanya untuk klarifikasi saja Pak ya, karena di saya dengar-dengar belakangan katanya Hotel Sultan itu sudah kembali ke Negara, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Karena di Komplek Senayan yang lama itu sudah ada Plaza Senayan, ada Hotel Fairmont, ada apartemen dan sebagainya bahkan ada Hotel Mulia juga.

Kemudian ke Pak Setkab nih, Pak Wamen.

Terkait anggaran 2023-2024 ya, ada program ke-2 yaitu penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sebetulnya bukan hanya dari Sekab ini tapi dari Setneg juga ya? Dari Setneg ada anggaran 2023 sebesar 2,26 triliun, kemudian di 2024 diturunkan kembali ke anggaran sebelumnya yaitu hampir sama dengan 2023 sebelum penyesuaian yaitu 1,26 triliun.

Kalau saya jumlahkan ternyata kegiatan yang sama judulnya itu terdapat juga di Setkab dan juga di KSP. Di Setkab sekitar 490 miliar atau *sorry* 49 miliar, dan di KSP sebesar 14 miliar. Sehingga kalau dijumlahkan seluruhnya ketiga lembaga ini untuk 2023 menghabiskan sekitar 2,3 triliun lebih untuk pelayanan Presiden dan Wakil Presiden.

Ini kalau saya bagi rata perhari ini kira-kira sekitar 6 miliar perhari, lumayan juga ini saya pengen penjelasan saja, ini apakah kenapa ini 2,26 di tahun 2023 ini setelah penyesuaian, kemudian diturunkan lagi ke 2024 menjadi 1,26? Apakah nanti akan ada lagi penyesuaian yang diminta pada anggaran perubahan nantinya di 2024.

Terakhir pertanyaan saya, bukan pertanyaan ini kepada BPIP. Di sini tadi saya lihat programnya banyak sekali Pak. Yang segala macam yang bikin bukulah, sosialisasilah, pelatihanlah dan sebagainya.

Sebetulnya urusan Pancasila ini sejak kita SD, dulu itu saya SD tahun 70 Pak *eh* tahun 64 Pak SD, sudah belajar itu namanya Pancasila lah mungkin berubah-ubahlah istilahnya PPKN lah namanya, Sifiklah namanya entah apalah ya.

Kemudian waktu mahasiswa ada namanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, ada pendidikannya BP7 dan seterusnya-seterusnya, diganti nama lagi sekarang BPIP dan seterusnya.

Tapi kita ini semakin hari semakin jauh dari Pancasila. Menurut saya ini Pak, yang penting dididik untuk Pancasila ini adalah anak-anak dari mulai 0 (nol) ya. Kalau pelatihan yang sudah mapan seperti kita ini yang sukaratan seperti kita ini percuma ini, dikasih buku segala macam enggak akan tolong Pak menurut saya. Hanya sekedar tahu mahir membaca, mahir mengetahuinya, tapi menjadi orang yang Pancasila tidak akan terjadi, sudah rusak, sudah rusak dari awal.

Menurut saya justru harusnya BPIP itu fokus pembinaan karakter Pancasila itu mulai dari Paud. Dan merekalah yang harus dididik dan juga kepada orang-orang tua.

Saya pernah mengambil contoh ya. Sekarang kalau orang kecelakaan di jalan terkapar, kebanyakan orang Indonesia itu ngapain? Apakah menolong atau memvideokan? Memvideokan dibiarkan itu mati. Apakah itu ajaran Pancasila ya?

Kemudian ada orang tua nih, membawa anaknya bawa sepeda motor, anaknya masih kecil dibawa sepeda motor di depan tanpa helm, berdiri pula anak itu ada lampu merah disebrangin, ditrobos. Si anak dengan bangga di dalam hatinya mengatakan "ayah saya jagoan berani menerobos lampu merah", lawan arus berani melawan arus, kalau ditegor Polisi, dibentak Polisi. Anaknya bangga "ayah saya berani melawan Polisi".

Ini tertanam dalam tubuhnya dalam mentalitasnya sampai dia besar, sehingga yang terjadi manusia yang tidak Pancasila. Yang tidak tertib hukum, tidak tertib aturan, tidak tertib social. Ini menurut saya yang harus diperhatikan Pak dari BPIP.

Ini sudah yang kedua kali saya sampaikan, pertama waktu konsinyering pada saat itu yang hadir Sekjen atau Sestama, ini yang kedua saya sampaikan ini.

Saya kira yang tadi program-program itu bagus sih bagus. Cetak buku lagi 2.000 buku, kita cetak setiap hari juga dibaca orang masih syukur kalau dibaca. Kalau ditaruh dirak buku doang? Enggak ada gunanya juga habis anggaran. Kalau dibaca hanya sekedar tahu, untuk mengimplementasikan untuk menjadi orang yang Pancasila itu jauh panggang dari api, karena kita sudah karatan Pak, sudah karatan semua kita ini.

Menurut saya itu yang paling penting, mohon izin kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya berharap pendidikan ini karakter Pancasila ini harusnya ini yang menjadi *elementary education* yang harus kita berikan kepada anak-anak mulai dari Paud, dan orang-orang tuanya juga didik supaya membuat anaknya menjadi manusia yang Pancasila, bukan sekedar tahu Pancasila.

Itu penyakit kita orang Indonesia, sekedar tahu itu banyak kita ini ahli jagoan semua, tapi untuk menjadi seperti yang kita ketahui itu jauh panggang dari api.

Ini barang kali Pak, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ongku.

Pak Mardani.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah.

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota, Pak Menteri, Setkab, KSP, BPIP,

Tadi waktu pagi dengan Kemendagri saya sampaikan bab ini juga Pak Menteri. Di Komisi II itu saya sudah 2 periode itu *conviction rate*-nya tingkat kepilihan kembalinya itu cuma 22% begitu. Kalau dari 54 itu ya 16-18% lagi yang bisa duduk lagi begitu. Karena memang komisi ini komisi yang berat tantangannya tapi juga ya dengan segala halnya beda dengan komisi yang lain Pak Menteri.

Karena itu usul saya Pak Menteri, karena kita memang sudah 4 tahun bahkan dari sebelumnya dari periode yang lalu Pak Menteri, sekali-kali undang Komisi II ke Istana Pak Menteri biar temanlah begitu, karena kitakan support terus ya.

Kalau tadi saya lihat kalau Pak Ongku bilang 6 miliar kurang itu buat Presiden dan Wapres saya maunya 8 miliar perhari, jangan 2,3 3-4 triliun juga boleh begitu. Mudah-mudahan Presiden dukungan kami yang menang nanti Pak Menteri, kan bagus begitu loh. Mana-manalah yang menang baguslah begitu.

Jadi itu yang pertama Pak Menteri, biar memang akrab karena memang sekecil apapun kami di Komisi II memberikan setitik bantuan dari tingkat kepuasan publik yang tinggi pada pemerintah Pak Jokowi khususnya.

Yang kedua, titip saja bahwa anggaran ini uangnya rakyat, makanya titip Pak Menteri dan semua dijaga amanahnya. Dan titip tadi Pak Ongku juga bagus, kalau ada yang bisa kolaboratif, kolaboratif saja jangan sendiri. Mumpung satu rumpukan nih Setneg, Setkab, KSP, 3 ini khususnya itu biar betul-betul optimal.

Untuk Pak Mensesneg saya sih punya usul, mungkin bisa ada satu DIPA khusus namanya *presidential scholarship*, beasiswa presiden khususnya untuk negara jangan dalam negeri kalau dalam negeri sudah ada LPDP, tapi untuk negara-negara boleh Afrika, boleh terbelakang, biar kita bagus begitu.

Saya pernah ke Jogja Pak Menteri, UII setahun memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing 50, UGM cuma 5 Pak Menteri, bukan apa-apa karena memang budgetnya UGM enggak ada.

Tapi kalau *presidential scholarship* ya sudah dibuka saja. Misal 40 orang setiap dari 30 negara kan masih bisa tuh kalau dia S2 dua tahun, kalau S3 tiga tahun. *Nah*, itu nanti bagus juga bahwa setiap Presiden itu punya *Legacy Presidential Scholarship*, dan menurut saya pasti kita Komisi II akan menyetujui.

Terakhir untuk BPIP. Saya tetap ingin ada film. Film tentang Pancasila begitu loh. Dulu saya selalu unkit tentang Ipin Upin begitu loh ya. Saya, anak, cucu sekarang begitu loh suka dengan Ipin Upin. Karena itu ada Meme, ada Jarjit, ada orang Indonesia juga ada orang Melayu ada begitu loh sehingga betul-betul *blended*-nya tidak dalam bentuk yang *hard* tapi yang *soft*, sehingga masyarakat dari kecil itu sudah tahu kita tuh bineka kita itu.

Karena kedepan dengan arus informasi yang demikian dahsyat setiap orang bisa mikir pikiran sendiri dan itu sangat berbahaya. Saya lagi sedih, satu, kejadian di Kalideres itu meninggal 3 orang enggak ada yang tahu. Satu lagi ada kejadian di Cinere 2 orang sudah itu. Maksud saya individualisme itu makin meningkat padahal keguyuban gotong-royong adalah nilai utama dari Pancasila, dan menurut saya kita perlu betul-betul mencari cara agar Pancasila tidak jadi jargon.

Kalau saya selalu bilang Pancasila sebagai *principal ideology no doubt about it*, kita setuju. Tapi bagaimana menularkan Pancasila menjadi *working ideology* yang kita disiplin, yang kita tadi penolong, yang kita mungkin ramah, yang kita macam-macam. *Nah*, itu pekerjaan besar kita. *Nah*, BPIP itu bisa masuk menurunkan Pancasila sebagai *working ideology* jangan ke *principal ideology* jangan jadi jargon, kalau jadi jargon menurut saya kita jatuh lagi seperti Orde Baru ataupun Orde sebelumnya.

Itu saja Pimpinan, terima kasih mohon maaf kurang lebihnya.

*Hadanallah wa iyyakum ajma'in,
Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq,
Walakuminkum.*

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Mardani.

Istana Presiden rencananya mau buat konser, undang Komisi II ya Pak Mensesneg ya? Biar tambah akrab, tapi di IKN Pak.

Soal film ada Pak Mardani, animasinya teman-teman BPIP ini apa bisa dijelaskan teman-teman.

Silakan Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore salam sejahtera buat kita bersama,

**Ketua dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Mensesneg dan Pak Mensekab atau yang mewakili,
Pak KSP, BPIP beserta seluruh jajaran,
Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan,**

Saya akan masuk kepada pembahasan anggaran Pak Mensesneg. Di sini disampaikan bahwa BNPP yang dianggarkan pemasukannya itu 436 M, *alhamdulillah* terealisasi 86,67%. Tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena jarang-jarang selama kita sudah 4 tahun melakukan pembahasan anggaran termasuk tentang pemasukan anggaran dari BNPP ini, hari ini tahun ini memang *surprise*. Tentu saya memberikan apresiasi bisa merealisasikan anggaran pada tahun ini berjumlah 378 M.

Yang kedua adalah saya juga memberikan apresiasi barang kali keseluruhan pemakai anggaran kecuali KSP, di mana disampaikan bahwa berturut-turut 10 kali, 11 kali, 4 kali, Wajar Tanpa Pengecualian.

Yang enggak menyampaikan apakah memang ada bagaimana BPK menilai kepada KSP saya tidak tahu, tapi saya baca disini. Dan juga dijelaskan oleh pihak KSP itu tidak menjelaskan tentang Wajar Tanpa Pengecualian, bagaimanapun itu adalah merupakan prestasi yang luar biasa yang bisa dipertahankan secara terus menerus.

Berikutnya adalah tentang realisasi anggaran. Saya melihat ini yang signifikan itu adalah dari pemakai anggaran Mensekab yaitu 71,37% sedangkan Mensesneg adalah 59,94%, KSP 58,42%, BPIP 67,5%. Tentu memang tidak pas juga manakala dibandingkan anggaran dari masing-masing pemakai anggaran. Namun, saya *me-warning* bagaimana karena ini sudah di pertengahan bulan September, anggaran yang tersisa yang jumlahnya juga cukup signifikan. Bagaimana perencanaan terhadap pemakaian anggaran jangan nanti setelah di akhir anggaran itu tentu berbeda ranahnya berbeda wahananya?

Oleh karena itu tahapan-tahapan ini perlu juga dilakukan kajian sehingga realisasi anggaran itu bagaimanapun tentu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat yang bisa memanfaatkan terhadap anggaran yang dicairkan. Jadi saya hanya *me-warning* agar realisasi anggaran di akhir itu mudah-mudahan pemakaian anggarannya bisa mencapai hampir memang 100% tapi belum pernah saya mendengar.

Belum pernah saya mendapatkan laporan yang 100% dan itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang luar biasa. Bisa saja itu dalam tataran penyematan dan juga bisa juga karena perencanaan yang tidak matang. Tentu dalam prespektif yang berbeda-beda pula dalam menyikapi kelebihan anggaran di tahun anggaran tersebut.

Kemudian apakah Pak Mensesneg stafnya salah ketik atau tidak? Ini dikatakan di halaman 8 ini saya catat ini, bahwa anggaran tahun yang lalu dibandingkan tahun yang lama terjadi penurunan 1.000 rupiah. Saya bukan bicara 1.000 rupiahnya, penurunan?

Saya lihat kenaikan karena kenapa saya katakan kenaikan? Kalau di 2023 anggarannya itu adalah 2.650.162.588.000 sedangkan di 2024 2.650.162.589.000 artinya berlebih. Kalau berkurang apa? Diangka 58, 7 baru turun. Apakah ini salah ketik atau bagaimana?

Tolong di jadi bagaimanapun ini adalah dokumen apalagi ini di Kementerian Sekretaris Negara tentu kalau dibaca oleh orang luar artinya perlu kecermatan dalam melihat angka, baru angka itu bisa diinterpretasikan naik atau turun.

Supaya lebih jelas halaman 8 Pak Sesneg, itu di alinea ke-4, nomor 2 paling bawah, di alinea 4 *statement*-nya menyatakan "bahwa pagu anggaran tersebut hanya mengalami penurunan sebesar 1.000 rupiah. *Nah*, ini padahal saya lihat angkanya kalau saya kalkulasikan naik menjadi 1.000 rupiah.

Lalu yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang anggaran Mensesneg ini, tadinya dikatakan bahwa anggarannya pertama dalam pagu anggarannya 2,65 T. Dalam perjalanan terjadi perubahan anggaran menjadi 3,662 T, artinya ada penambahan anggaran. Tentu kita, lalu apa? Pak Mensesneg mengatakan kalau dibandingkan dengan penambahan anggaran yang dilakukan itu terjadi penurunan anggaran tahun 2024 ini sebanyak 27%.

27% itu tidak sedikit, oleh karena itu saya menanyakan kepada Pak Menteri, apakah tidak akan terganggu kegiatan dan program Mensesneg dalam mem-*back up* pekerjaan kerja-kerja dari pada Bapak Presiden dan Wakil Presiden.

Memang dari awalnya tadi memang dikatakan Rp1.000 itu bedanya. Tapi dalam perjalanan terjadi kenaikan yang nilainya adalah 1 T. Artinya anggaran 2023 Mensesneg itu pemakaian anggarannya adalah 3,6.

Sekarang pagu anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan bersama Bappenas adalah sebanyak 2,650, berarti penurunan. Dan Pak Sesneg pun juga menyatakan terjadi penurunan anggaran bila dibandingkan dengan kenaikan perubahan anggaran itu 3,6 menjadi turun 27.

Yang ingin saya pertanyakan adalah kerja-kerja dari Pak Presiden dan Wakil Presiden sebagai di *back up* oleh Mensesneg apakah tidak akan terjadi kegiatan-kegiatan yang mengganggu Bapak Presiden dan Wakil Presiden, atau memang karena ada agenda-agenda khusus sehingga lalu di perubahan anggaran dilakukan kenaikan anggaran. Tentu saya ingin mempertanyakan kepada Pak Menteri bagaimana tentang persoalan itu?

Berikutnya adalah tentang tambahan anggaran, saya lihat memang Mensesneg tidak meminta tambahan anggaran. Yang minta anggaran hanya Mensekab, nilainya sangat kecil dan anggarannya juga kecil yaitu 16 M sedangkan BPIP meminta 149 M.

Oleh karena itu tentu saya *insya Allah* barangkali saya yakin dan percaya seluruh Anggota Komisi II kepada mitranya ini kita tidak pernah memangkas selagi itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, tentu kita memberikan *applause* memberikan apresiasi terhadap anggaran-anggaran yang diperlukan oleh mitra kami.

Karena apa? Saya selalu sebutkan di Komisi I itu hanya satu kementerian persoalan anggarannya yang bermasalah itu 8 T bermasalah, satu kementerian. Kita

dikumpulkan yang paling tinggi itu di sini kira-kira ATR/BPN anggarannya sekitar 7, kemudian Kementerian Dalam Negeri 3,3 tadi kami bahas, sekarang Mensesneg yang 2,6. Selebihnya adalah M, M, M.

Tentu kami iri juga maka saya mendorong kepada seluruh kementerian mitra kami bagaimana membuat *grand desain* yang luar biasa sehingga anggarannya menjadi besar. Bukan dibesar-besarkan, tetapi dalam rangka untuk kepentingan bangsa, negara dan lain sebagainya.

Ada *event-event* bagaimanapun ada *event* untuk melaksanakan *event-event* tingkat nasional, itu adalah bagian juga dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, ini kepada Pak Menteri Mensesneg ini.

Artinya kita tidak mempermasalahkan adanya penambahan anggaran kalau memang itu dibutuhkan dalam rangka juga menjaga harkat martabat.

Terakhir kepada BPIP tentu kita berharap, sebagaimana yang sudah dilansir oleh kawan-kawan tadi lompatan-lompatan anggaran BPIP ini sangat dahsyat dari 100 sekarang sudah menjadi 341 M, sekarang meminta tambahan 149 M. Artinya penambahan dari pokok anggaran itu bukan kecil, besar lebih dari separuh.

Yang ingin disampaikan adalah tentu kita berharap tambahan anggaran ini perlu perencanaan yang matang dalam rangka karena kita lihat sampai detik ini belum ada *greget* dari pada BPIP kelapangan, walaupun kami sudah berupaya melakukan sosialisasi memang orang mempertanyakan apa itu BPIP.

Oleh karena itu sosialisasi terhadap Pancasila dan bagaimana memaknai dan lain sebagainya ini yang penting jadi tidak hanya bersifat yang formalitas saja, tetapi yang substansinya itu apa?

Sebetulnya anggaran BPIP ini berapapun, kalau memang dalam rangka menjawantahkan permintaan, keinginan dari pada Pak Presiden. Tentang masalah etika, masalah moral, kan itu yang pertama kali yang diucapkan oleh Pak Presiden Pak Jokowi, ketika apa? Revolusi mental bagaimana kita mengolah, bagaimana mengejawantahkan, bagaimana revolusi mental itu betul-betul bermakna dan berarti.

Ini saya lihat apa yang diilustrasikan oleh kawan-kawan tadi, itu enggak terasa. Kita nilai-nilai pancasilanya luar biasa, tetapi dalam artikulasi pemaknaan kemudian pelaksanaan keseharian itu makin lama makin rusak ini mental dari pada masyarakat kita.

Dan adalah merupakan kewajiban kita bersama tentu BPIP sebagai orang yang dipercaya oleh Presiden bisa meng-*grand desain* bagaimana nilai-nilai Pancasila itu

untuk bisa diwehwantakan tentang revolusi mental yang diinginkan oleh Bapak Presiden, dan saya lihat ini belum ada gelagat kearah itu.

Tentu saya merasa prihatin bagaimanapun Pak Presiden sudah akan mengakhiri masa jabatannya, ternyata tentang revolusi mental yang saya sangat respon kepada beliau ada gagasan yang semacam itu.

Barang kali demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya terima kasih Pak Gaus.

Ibu Rezka, Pak Muraz saya mau ingatkan ini 18.15 saya belum sholat. Kalau Bapak-bapak boleh pasti bolak-balik begitu jadi, jadi bukan Bapak-Ibu saja yang masuk surga saya juga mau masuk surga. Jadi 18.30 ya kalau 18.30 enggak selesai kita *break*, kita *break* nanti sambung lagi.

F-DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA):

Sedikit saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

F-DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II beserta Bapak-Bapak Anggota Komisi II serta seluruh mitra Komisi II, Setneg, Setkab, KSP, dan BPIP,

Saya singkat saja.

Pertama kali saya memberikan apresiasi untuk 4 mitra Kementerian/Lembaga Komisi II, yang bisa penyerapan kalau bisa disebutkan rata-ratanya di atas 60%. Saya berharap penyerapan yang baik ini bisa dipertahankan dan program-program yang ada benar, tepat sasaran hingga masa tahun anggaran selesai.

Dan khusus KSP yang masih di bawah 60%, kami berharap untuk bisa meningkatkan kinerja dan penyerapannya, serta memberikan citra yang makin baik sebagai salah satu Kementerian dan Lembaga yang berada di ring 1-nya presiden.

Saya, untuk Pak Menteri Setneg. Pak Menteri, tahun lalu ini juga sudah pernah saya sampaikan, kami juga pernah menyampaikan ini. Tahun 2021 tepatnya Juli, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diambil alih oleh Kementerian Sekretaris Negara. Saya mengetahui bahwa sejak diambil alih, Taman Mini itu mulai beroperasi sekitar bulan November, 20 November 2022. Dari data yang ada pada libur lebaran pengunjungnya bisa membeludak bisa sampai 20.000 pengunjung.

Apalagi baru-baru ini, 1 September 2023 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ini tampil dengan dengan desain kekinian. Kita tahu sekali dengan wajah baru ini taman mini menampilkan, menawarkan, bahana-bahana dan atraksi-atraksi yang memberikan hiburan dengan mengedepankan budaya nusantara dan kreativitas anak bangsa. Ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Pak Menteri, melihat data dan antusias di lapangan, saya kembali mempertanyakan Pak, kenapa Taman Mini Indonesia Indah ini tidak masuk pada 2024 ini kedalam sumber PNBPN Setneg?

Seharusnya Taman Mini ini menjadi salah satu sumber utama untuk PNBPN. *Nah*, untuk apa diambil alih kalau ujung-ujungnya tidak bisa menyumbang kepada kas negara? Sehingga saya minta penjelasan dari Pak Menteri dan juga bagaimana sistem masuknya pendapatan Taman Mini ini terhadap kas negara.

Mungkin itu saja yang akan, yang saya sampaikan untuk ke Setneg. Yang lainnya sudah diberikan pendalaman oleh teman-teman yang lain.

Terima kasih Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini pertanyaan sama dengan Pak Ongku tadi, iya sama jangan-jangan Pak Muraz mau omong begitu juga? Enggak ya, oh enggak ya.

Saya cuma mau ingatkan ini kita, kita sedang bicara tentang anggaran ya. Apa namanya, dan ini sudah kita bicarakan 3 kali sebenarnya ini yang ke-3. Kalau ada hal yang di luar itu nanti silakan saja dijawab tapi lebih detailnya mungkin kita cari raker agenda yang lain kalau ada masalah di luar anggaran.

Silakan Pak Muraz.

F-DEMOKRAT (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Pak Ketua, para Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Sekab, Pak yang mewakili KSP dan BPIP beserta jajaran,**

Terima kasih atas kesempatan.

Saya tidak berbicara anggarannya Pak, tapi ini pertama ke BPIP, Pak. Di sinikan disampaikan capaian strategis 2023. Berarti *output* dari anggaran yang dilaksanakan, ada penyusunan dan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar, menengah, paud, sampai dengan SMA. Inikan yang disampaikan melalui kurikulum ini ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan apakah kurikulumnya sudah berjalan atau belum? Kemudian bukunya kan pernah beberapa kali diminta dibagilah untuk para Anggota Komisi II sampai sekarang belum? Belum ada, ya.

Nah, nanti dievaluasi di 2023, apa yang mau di-evaluasi kalau belum dilaksanakan karena anggarannya sudah tersedia.

Inikan berkaitan Pak dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila ini ada Kelembagaan ada sampai ke penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, saya kira banyak sekali tugas bapak ini di BPIP ini.

Nah, yang kedua ini pertanyaannya sambung dengan KSP Pak, sambung dengan KSP. KSP dengan BPIP, kan kita tahu tugas KSP itu selain pengendalian program-program prioritas nasional termasuk di dalamnya komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. *Nah*, ini tentu yang kita harapkan dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila. Yang konon dari survei katanya masyarakat Indonesia ini baik yang beragama Islam, *non-*

Muslim, pendidikan SD sampai S1 mungkin S2, sudah diatas 25% tidak acuh lagi terhadap Pancasila ini berbeda dengan yang barang kali harapan Bung Karno, ya. Bahwa Pancasila ini memang digali dari bumi Indonesia ya harus diketahui harus diamankan begitu.

Maksud saya Pak, ini bagaimana komunikasi politik Bapak, pengelolaan isu strategis tadi termasuk dari BPIP misalnya sampai terjadi kasus yang sekarang ramai Pulau Rempang?

Saya kira itukan tugas KSP Pak? Bagaimana komunikasi politiknya? Bagaimana isu strategis yang dikelola di sana?

Apakah nilai Pancasila sudah enggak masuk di sana dan lain sebagainya?

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Muraz.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Saya langsung saja persilakan kepada Saudara Mensesneg baru kemudian nanti sambungan yang lain.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (Prof. Dr. PRATIKNO, M.Soc., Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Terima kasih atas masukannya, pertanyaanya.

Jadi yang pertama dari Pak Ongku Hasibuan. Jadi memang di BLU kita itu kontrak-kontrak dengan mitra itu sudah berjalan lama, sebagian sudah mulai ada yang berakhir. Jadi misalnya yang sudah, dan selama belum berakhir itu kita sudah bertahun-tahun terus melakukan renegotiasi agar negara memperoleh manfaat yang lebih besar.

Yang sudah berakhir misalnya kalau di GBK itu adalah *driving range*. Yang kemudian karena waktu itu arahan Pak Presiden juga bahwa Jakarta itu sangat miskin dengan *public space* makanya kita konversi menjadi hutan kota. Kemudian ada 1 restoran yang 1 bangunan yang kemudian sekarang digunakan restoran plataran. Itu juga manfaat publiknya lebih baik dari pada dulu tertutup *driving range* dan kemudian juga menjadi kawasan hijau, dan juga memberikan pemasukan. Jadi kami mencoba membuat keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dengan kepentingan untuk layanan publik secara umum ini.

Kemudian yang akan berakhir juga adalah yang sudah berakhir juga adalah Hotel Sultan, sudah kasasi 4 kali dan kita Pemerintah menang. PK ya? PK sudah 4 kali, PK-nya 4 kali sudah dinyatakan menang. Jadi walaupun kemudian di PTUN lagi, tapi itu hal lain. Jadi kita sudah Pak Menkopolkam sudah undang rapat juga untuk mulai dilakukan eksekusi.

Dan sekali lagi prinsipnya adalah memberikan layanan publik lebih baik di *public space*, karena Jakarta sangat miskin dengan *public space* kita, tanah negara ini digunakan lebih baik untuk *public space* tapi sekaligus juga tetap memberikan kemanfaatan ekonomi untuk negara.

Jadi dua hal itu yang coba terus kita seimbangkan. Jadi kontrak-kontrak besar tentu saja kita akan terus *government* sebaik-baiknya. Jadi memberikan manfaat yang lebih besar.

Terima kasih atas masukan Bapak/Ibu sekalian.

Dan yang kedua, tadi dukungan pelayanan kepada Presiden dan Wapres yang menurun. Itu sebetulnya kita itu apa dihadapkan kepada belanja yang sulit diperkirakan sebelumnya jauh-jauh hari. Misalnya adalah acara-acara *event* G20, KTT ASEAN, ASEAN *Plus*, dan seterusnya. Yang semuanya sangat tergantung kepada berapa kepala negara yang datang, kemudian tamu undangan, karena beberapa tamu undangan dari negara kecil itu ditanggung oleh kita sebagai *host* kecuali negara-negara besar.

Jadi kita hadapkan kepada situasi semacam itu. Jadi makanya kalau, kalau sulit diprediksi kita ya saya baca tidak besar dan kemudian nanti ketika saatnya terpaksa harus dilakukan revisi penambahan kami akan mengajukan. Mungkin selama ini begitu.

Pak Mardani terima kasih kalau undang ke Istana, asalkan Istana yang tidak digunakan untuk Pak Presiden tentu saja leluasa Pak, itu bisa diatur.

Kolaborasi Setneg, Setkab, KSP, kita terus lakukan karena itu adalah satu institusi lembaga Kepresidenan yang tugasnya melayani Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan untuk *scholarship* itu *labelling*-nya yang kita belum gunakan Pak. Tapi yang jelas Pemerintah karena kita juga masuk negara menengah atas untuk pehasilan negara menengah atas. Bantuan luar negeri justru tidak masuk ke kita, tetapi kita yang memberikan bantuan ke luar negeri.

Jadi makanya ada Badan Pengelola Hibah Luar Negeri, itu *board*-nya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas. Itu memberikan bantuan untuk negara-negara sahabat kecil yang mengalami kesulitan, bencana alam, termasuk juga bantuan-bantuan berupa pendidikan dan itu juga dipegang oleh LPDP. Cuma tadi terima kasih, Pak Mardani yang memberikan masukan untuk dilabelli *Presidential Scholarship*.

Yang jelas misalnya sebagai satu contoh. Kita memberikan beasiswa lebih banyak kepada mahasiswa dari Afrika. Barusan ini, untuk Papua Nugini. Papua Nugini untuk *study* ke Indonesia. Jadi pengalaman kita, mahasiswa itu selalu punya kenangan manis tempat dia sekolah walaupun pada saat sekolah dia menderita. Jadi itu kenangannya selalu manis.

Jadi kita berusaha untuk memberikan beasiswa lebih banyak kepada negara-negara Asia Selatan, pasar barulah, Afrika termasuk Papua Nugini, negara pasifik itu makin bertambah dikoordinasi oleh Badan Pengelola Hibah Luar Negeri.

Yang berikutnya, tadi yang selisih apa tadi sudah saya jawab juga untuk Pak Gaus yang kaitannya dengan kenaikan, penurunan, anggaran di Kementerian Sekretariat Negara kaitannya dengan *event* nasional, internasional. Yang seribu rupiah tadi nanti dijelaskan Pak, sudah total kami cek sudah benar.

Yang berikutnya dari Ibu Rezka. Terima kasih Ibu, jadi Taman Mini itu kita ambil alih karena memang kondisinya sangat mengesankan pada waktu itu. Sudah tidak terawat dengan baik. Makanya kita memanfaatkan momentum untuk G20 pada waktu itu ya, G20 kemudian direnovasi oleh negara kurang lebih belanjanya 1, (koma) hampir 1,1 Triliun untuk renovasi. Kemudian di *clear*-kan mana yang asetnya Setneg mana yang asetnya Yayasan Harapan Kita karena waktu itu tidak ada kesepakatan dengan Yayasan Harapan Kita, oleh karena itu pintu masuknya dari selatan itu dari Pintu 3 itu sampai sekarang.

Tapi Setneg merasa bahwa kita enggak punya kompetensi untuk mengelola itu karena kami ingin profesional makanya kemudian arahan Pak Presiden juga dilimpahkan dipengelolaannya kepada BUMN, dengan harapan nanti ada koneksi dengan yang lain-lain dengan BUMN wisata yang lain.

Jadi pengunjung sudah banyak tapi kami menyampaikan kepada BUMN bahwa mandat sosialnya harus dijaga. Jadi oleh karena itu pintu apa harga tiket masuk itu tetap dipertahankan, tetap dipertahankan Rp25.000,00.

Kami menyampaikan pesan bahwa masyarakat kelas menengah atas punya pilihan banyak. Tapi masyarakat bawah ekonomi bawah tidak punya pilihan di Jakarta. Makanya TMII kita harapkan jadi alternatif. Tiket enggak boleh dinaikan, tapi wahana yang lain silakan dinaikan kalau memang itu *unique* sifatnya spesifik. Misalnya apa namanya Keong Emas terus kemudian Burung apa, dan seterusnya itu yang ada khusus. Tapi beberapa *event* di pulau-pulau itu juga terbuka untuk umum untuk malam hari.

Jadi memang sampai sekarang ini mereka masih *invest*. Negara *invest* 1, (koma) triliun untuk renovasi macam-macam termasuk *venue-venue* apa namanya yang punyanya daerah-daerah itu. Kemudian BUMN *invest* sekitar 200an miliar rupiah, dan kita harapkan itu menjadi 1 alternatif wisata bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Kita akan mendapatkan, tahun 2024 sudah masuk. Jadi ada kontribusi *flat* dari BUMN tapi habis itu ada kontribusi variabel berbasis pada *gross revenue* ya. Kami tidak mau lagi *revenue sharing* berbasis pada *nets* seperti pengalaman kita di Hotel Altet Century dan lain-lain. Kita basisnya adalah *gross revenue* agar juga mendorong mitra untuk melakukan efisiensi. Itu pengalaman kita terhadap kontrak-kontrak yang lama kita lakukan revisi.

Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang lengkap dan kurang berkenan. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Saudara Mensesneg.

Selanjutnya Wakil Sekretaris Kabinet.

WAKIL SEKRETARIS KABINET RI (Dr. FADLANSYAH LUBIS, S.H., LL.M.):

Terima kasih Ketua.

Mungkin dari Setkab tadi lebih banyak pada masukan. Yang pertama yang disampaikan oleh Pak Ongku, kemudian Pak Mardani Ali Sera, Pak Gusparadi Gaus, kemudian dari Ibu Rezka juga.

Terima kasih yang pertama atas apresiasi, baik terhadap penyerapan anggaran Sekretariat Kabinet dan mudah-mudahan atas dukungan Pimpinan dan Para Anggota Komisi II yang kami hormati, kami bisa lebih maksimal untuk menuntaskan sisa waktu hingga tahun ini.

Mungkin satu yang dari Pak Ongku kami menjawab sedikit, terkait dengan anggaran penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Memang waktu di tahun 2023 kita ada *automatic adjustment* tapi anggaran tersebut memang kita gunakan sepenuhnya untuk penyiapan dari pada rencana-rencana kebijakan Presiden, jadi itu.

Nah, untuk anggaran 2024 ini memang belum ada kebijakan baru dari Menteri Keuangan sampai mungkin nanti kalau terjadi lagi *automatic adjustment* maka kami akan menyesuaikan.

Kira-kira itu Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Silakan Deputi II.

DEPUTI II KSP BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Ongku, Pak Mardani, Pak Gaus, Ibu Rezka dan Pak Muraz. Terima kasih Pak untuk masukan dan kemudian juga catatan-catatan yang diberikan.

Pertama Pak terkait dengan catatan anggaran Pak, memang benar bahwa masih 58,42% masih dibawah yang lain. Namun, sebenarnya secara umum kegiatan sesuai dengan perencanaan. Dan banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan namun penagihan atau pembayaran belum dilakukan. Sebagai catatan Pak tahun 2022, realisasi Kantor Staf Presiden itu 99,4%.

Kemudian juga tadi pertanyaan Pak Gaus terkait dengan bagaimana mungkin prestasi atau penghargaan terkait dengan pengelolaan keuangan, kami Kantor Staf Presiden bagian dari Satker di Setneg. Tetapi sebagai informasi bahwa tahun 2021 dan

tahun 2022 secara berturut-turut KSP mendapat penghargaan dari Kemenkeu untuk katagori indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan predikat peringkat pertama.

Tadi disampaikan oleh Pak Mardani Pak, ini terima kasih Pak terkait dengan pendidikan karena memang salah satu isu strategis. Tapi sebagai informasi untuk Pak Mardani bahwa, kita punya satu proyek strategis nasional bidang pendidikan Pak namanya Universitas Islam Internasional Indonesia, *nah* itu semua beasiswanya di Depok Pak itu beasiswa semua Pak untuk dalam dan luar negeri, dan kita menggunakan dana dari LPDP untuk itu Pak dan itu memang strategi kita untuk menyebarkan Islam Indonesia yang lebih luas ke negara-negara lain Pak.

Kemudian juga untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Muraz terkait dengan strategi komunikasi, kaitannya juga dengan beberapa isu. Kami memang sampai saat ini khusus untuk Rempang Pak, memang melakukan pengamatan karena memang sudah ada arahan Bapak Presiden kepada menteri terkait Pak, untuk memberikan respon dan kemudian juga komunikasi dengan masyarakat.

Kami di Kantor Staf Presiden ini akan mengawal lebih dekat untuk melihat dan sekaligus juga mengamati perkembangan situasi di lapangan Pak, ada Pak Bahllil maupun Pak Menkopolhukam sudah ditugaskan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Saudara Deputi II.

Wakil Kepala BPIP, singkat saja.

Kalau enggak sholat, enggak Pancasilais nanti kita.

Silakan.

WAKIL KEPALA BPIP (Dr. Drs. KARJONO ATMOHARSONO, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Kalau enggak sholatkan engga pancasilais, silakan Pak.

WAKIL KEPALA BPIP (Dr. Drs. KARJONO ATMOHARSONO, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan, izin.

**Yang terhormat Pak Ongku Hasibuan,
Kemudian juga Pak Mardani Ali Sera,
Begitu juga Bapak Haji Guspari Gaus,
Dan juga Ibu Rezka Oktoberia,
Dan tadi yang terakhir Bapak Mohammad Muraz,**

Mohon dengan hormat dari BPIP menghaturkan banyak terima kasih. Sangat luar biasa, dari Bapak/Ibu Anggota Komisi II memberikan masukan-masukan yang nantinya akan segera kami tindak lanjuti.

Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Ongku Hasibuan. Bahwa intinya minta tolong agar Paud sampai wadah utamanya dipendidikan karakter Pancasila dan juga kepada orang tua.

Selanjutnya mohon izin kami haturkan Bapak, Pak Mardani Ali Sera. Bahwa BPIP telah membuat film animasi Satria Garuda, kemudian juga animasi lorong waktu si AA. Nah, ini misalnya saja tahun 2022 itu *viewer*-nya itu sudah 1.366.320 Bapak izin. Kemudian juga film aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga film terkait dengan ekonomi Pancasila, dan kita juga sedang menyiapkan beberapa film-film untuk pendidikan Pancasila.

Selanjutnya mohon izin terkait dengan Pak Gaus tadi, kami juga terkait Pancasila ini gerakannya sangat luar biasa, misalnya saja 4 pilar itu di di MPR, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga wawasan kebangsaan oleh Kemendagri, revolusi mental oleh MenkoPMK, bela negara oleh Menhan, dan juga gerakan 6 karakter pelajar Pancasila oleh Kemendikbud.

Kemudian juga terkait dengan Pak Mohammad Muraz mohon izin, begitu juga ini mutatis mutandis dengan Pak Ongku Hasibuan, terkait dengan pentingnya mata pelajaran Pancasila Bapak.

Izin kami laporkan bahwa sejak reformasi 98 itu TAP MPR Nomor 2 Tahun 78 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian Lembaga BP 7 dibubarkan Bapak. Dan yang lebih serius terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang 2 Tahun 89 dan sebelumnya menggantikan Undang-Undang PNPS Tahun 1965. Ini menghapuskan mata ajar Pancasila maupun mata kuliah Pancasila.

Nah, terkait dengan hal ini memang ada 3 peraturan pemerintah yang melaksanakan Undang-Undang 20 2003 ini. Yang pertama itu tidak mengatur Pancasila. Yang kedua, mengatur bahwa mata ajar wajib itu kewarganegaraan didalamnya Pancasila. Dan kemudian ada perubahan ketiga juga tidak mengatur Pancasila.

Tiga peraturan pemerintah ini dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor, Tahun 2021 Nomor 45 terkait Standar Nasional Pendidikan. Dan ini hanya mengatur pendidikan dasar saja. Dan kemarin Bapak Presiden menetapkan peraturan pemerintah perubahan atas peraturan itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 yang mewajibkan mata ajar Pancasila itu mulai dari Paud sampai dengan perguruan tinggi, dan itu sekarang sudah digerakan secara massif, bahkan tidak hanya pendidikan formal tetapi juga termasuk pendidikan informal dan *non-formal*. Ini sampai kepada pesantren, sekolah pagi dan yang lain-lainnya.

Terkait dengan hal itu mohon izin, buku Pancasila ini sudah disiapkan juga sudah kemarin dibuat ada 15 buku mulai dari Paud sampai perguruan tinggi. Karena menurut Undang-Undang Perbukuan itu ada 2 buku Bapak. Yang pertama adalah buku untuk Babonnya yang disebut juga buku referensi utama. Dan ini sudah ditindak lanjuti juga dengan Kemendikbud, dan kurikulum juga sudah disahkan dan mulai berlaku tahun 2002, 2003 itu disebutnya dengan Buku Teks Utama Pancasila. Dan itu alhamdulillah berkat kerjasama keras ini sudah bisa diakses.

Mohon izin aksesnya kami haturkan ke Pak Ketua nanti buku-buku itu bisa dibuka seluruhnya Bapak. Karena kemarin yang terakhir itu membuat buku teks utama itu kelas 1 sampai kelas 12 termasuk buku pedoman bagi guru.

Mungkin itu yang bisa kami haturkan, terima kasih waktu yang diberikan.

Salam Pancasila.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya-iyaa, Pancasila. Waktunya enggak sampai 10 menit.

Terima kasih Wakil Kepala BPIP.

Bapak/Ibu sekalian.

Saya kira kita bisa langsung masuk pada kesimpulan, langsung aja.

F-PDIP (Ir. ENDRO HERMONO, .M.B.A.):

Pimpinan intrupsi Pimpinan.

Kanan-kanan, setengah menit.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Bapak sudah sholat belum?

F-PDIP (Ir. ENDRO HERMONO, .M.B.A.):

Sudah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya itulah, enggak *fair*-kan.

F-PDIP (Ir. ENDRO HERMONO, .M.B.A.):

Setengah menit aja, setengah menit Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya sudah ayo.

F-PDIP (Ir. ENDRO HERMONO, .M.B.A.):

Saya minta karena kita sudah konsinyering juga. Sudah dinamika pertanyaan cukup pendalaman juga sudah. Sebaiknya itu dari hasil konsinyering ini di notulensi dan dijawab sama mitra begitu, itu saja permintaan saya supaya apa? Itu dapat dipakai pegangan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya, iya dicatat Pak.

1. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2024 sebesar Rp2.650.162.588.000,00. Termasuk didalamnya pagu anggaran Kantor Staf Presiden sebesar Rp122.033.004.000,00 dan

penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp7.534.570.000,00. Dengan demikian Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Negara Tahun 2024 menjadi sebesar Rp2.657.697.158.000,00 dengan alokasi anggaran perprogram sebagai berikut:

- a. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.398.971.903.000,00;
- b. Program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Rp1.258.725.255.000,00

Setuju Pak? Pak Ses?

WAKIL SEKRETARIS KABINET RI (Dr. FADLANSYAH LUBIS, S.H., LL.M.):

Izin Pak.

Penambahan 7 miliar untuk penambahan gaji itu 7 miliar 534 itu tidak ada dalam usulan kami Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Tidak?

WAKIL SEKRETARIS KABINET RI (Dr. FADLANSYAH LUBIS, S.H., LL.M.):

Tidak ada Pak, *confirm* Pak.

Jadi besarnya Rp2.650.162.588.000,00 Pak. Tanpa yang 7 miliar itu Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Jadi besarnya tetap menjadi Rp2.650.162.588.000,00.

WAKIL SEKRETARIS KABINET RI (Dr. FADLANSYAH LUBIS, S.H., LL.M.):

Rp2.650.162.588.000,00, tidak ada tambahan yang 7 miliar Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Dari mana?

SEKRETARIS RAPAT KOMISI II DPR RI:

Yang 7 miliar itu dari yang kesepakatan di Banggar itu Pak, semua Kementerian dapat kenaikan gaji.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Jadi kami dapat surat dari Banggar kemarin sore, semua kementerian itu disetujui ada penambahan anggaran khususnya untuk peningkatan gaji, makanya kita masukan. Jadi pagunya berubah semua.

Jadi dari tadi pagi kita masukan semua. Inikan tindak lanjut dari Pidato Presiden pada saat itu di Banggar disetujui. Begitu.

Atau mau dihilangkan Pak?

WAKIL SEKRETARIS KABINET RI (Dr. FADLANSYAH LUBIS, S.H., LL.M.):

Eggak. Oke Pak, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Setuju Pak ya?

WAKIL SEKRETARIS KABINET RI (Dr. FADLANSYAH LUBIS, S.H., LL.M.):

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp348.769.306.000,00 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp2.237.422.000,00. Dengan demikian pagu alokasi anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2024 menjadi sebesar Rp351.006.728.000,00 dengan pengalokasian anggaran perprogram sebagai berikut:
 - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp309.996.806.000,00;

- b. Program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp41.009.922.000,00.

Setuju ya? Jadi ini penambahan itu kita masukin ke program dukungan manajemen semua, jadi ditambahkan di program dukungan manajemen. Setuju Pak ya?

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Sekretariat Kabinet sebesar Rp16.785.887.000,00 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut. Serta menambahkannya kedalam pagu alokasi anggaran pagu defintif Sekretariat Kabinet tahun 2024, melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

Itu bukan BPIP itu, itu Sekretariat.

Setuju? Pokoknya kita dukunglah.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebesar Rp341.127.197.000,00 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp1.141.840.000,00. Dengan demikian pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2024 menjadi sebesar Rp342.269.037.000,00 dengan pengalokasian anggaran perprogram sebagai berikut:
 - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp182.619.323.000,00;
 - b. Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar Rp159.649.714.000,00.

Setuju Pak?

.....:

...(suara tidak terdengar tanpa mic)

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

149 nanti, khusus-khusus ya, ini yang disetujui dulu. Ini setuju? Angkanya sudah pas?

.....:

...(suara tidak terdengar tanpa mic)

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Ada. Point 5 point 5 tenang saja, yang ini dulu, yang ini dulu.

Ini setuju dulu angkanya sudah cocok Ibu Sekjen?

Jangan salah.

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Point 5, atau ini mau *dilangin*?

5. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang di ajukan BPIP sebesar Rp149.181.317.000,00 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan anggaran tambahan tersebut serta menambakannya kepada, kedalam pagu alokasi anggaran atau pagu definitif BPIP tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak/Ibu sekalian,

Dengan kita sudah membacakan dan kemudian menyepakati kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat kita pada hari ini, maka rapat ini kita bisa akhiri.

Sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih pada Saudara Menteri Sekretaris Negara beserta seluruh jajaran. Pada Wakil Sekretaris Kabinet beserta seluruh jajaran. Pada Deputy II KSP beserta seluruh jajaran, dan juga kepada Wakil Kepala BPIP beserta seluruh jajaran.

Terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dengan mengucapkan *alhamdulillah hirobbil alamin* maka rapat kerja kita sore hari ini atau malam hari ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PKL 18.52 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002